



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JAMALUDDIN**
2. Jabatan : **ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM**
3. NHK : **403402**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.801.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/300 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.570.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/36 m2 di KAB / KOTA ---, WARISAN Rp. 78.500.000		
3. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 92.500.000		
4. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	599.350.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA/REBORN Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 403.850.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	449.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.485.830



F. HARTA LAINNYA	Rp.	14.200.000
Sub Total	Rp.	2.924.085.830
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.924.085.830

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.